



Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Layanan Lembaga Keuangan Mikro dan Program Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya

Wilman San Marino, Gun Gun Gunawan
Program Studi Keuangan dan Perbankan
Politeknik Triguna Tasikmalaya, Tasikmalaya, Indonesia

Abstract. *The purpose of this research is to analyze the effect of microfinance services and women's empowerment programs on poverty reduction. The research method used in this research is quantitative research methods. Data analysis using simple mediation analysis by Hayes. The sample of this study was 130 women who received microfinance in the Rajapolah District, Tasikmalaya Regency. The results indicate that there was a significant influence between the variables of microfinance institutions service and women's empowerment on poverty reduction, and the variable women's empowerment programs mediated the effect of microfinance services on poverty reduction. The implication of this research is that achieving development goals in the form of poverty reduction and women's empowerment can be achieved by increasing the quantity and quality of microfinance institutions services.*

Keywords: *Microfinance Institutions; Poverty Reduction; Women empowerment*

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh layanan lembaga keuangan mikro dan program pemberdayaan perempuan terhadap pengentasan kemiskinan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Pengujian model menggunakan simple mediation analysis by Hayes. Sample dari penelitian ini sebanyak 130 orang perempuan yang mendapatkan pembiayaan mikro di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variable layanan lembaga keuangan mikro dan pemberdayaan perempuan terhadap pengentasan kemiskinan, serta variable pemberdayaan perempuan memediasi pengaruh layanan lembaga keuangan mikro terhadap program pengentasan kemiskinan. Implikasi dari penelitian ini adalah untuk mencapai tujuan pembangunan berupa pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan perempuan dapat dicapai dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro.*

Katakunci: *Lembaga Keuangan Mikro; Pemberdayaan Perempuan; Pengentasan Kemiskinan*

Cronle of Article : Received (04-10-2020); Revised (11-11-2020, 02-12-2020); Accepted (16-12-2020) and Published (17-02-2021).

©2020 Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manjaemen Lembaga Penelitian Universitas Swadaya Gunung Jati

Profle and coresponding author : Wilman San Marino¹ dan Gun Gun Gunawan² adalah Dosen Program Studi Program Studi Keuangan dan Perbankan Politeknik Triguna Tasikmalaya Jl. Ibrahim Ajie no. 7, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat 46151. **Coresponding Author :** wilmansanmarino@gmail.com

How to cite this article : Marino, W. S., & Gunawan, G. G. (2020). Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Layanan Lembaga Keuangan Mikro dan Program Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Inspirasi Bisnis Dan Manajemen*, 4(2), 121–132.

Retrieved from : <http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/jibm>

PENDAHULUAN

Persoalan kemiskinan menarik untuk disimak dari berbagai perspektif, yaitu baik ekonomi, sosial, psikologi maupun politik. Dilihat dari perspektif ekonomi diharapkan masyarakat keluar dari belenggu keterpurukan ekonomi, mentransformasikan orang miskin dengan stigma beban masyarakat menjelma sebagai sumber daya yang berkontribusi positif dalam proses pembangunan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan yang merupakan komitmen bersama dari pemerintah Indonesia dengan berbagai negara yang tergabung

bersama dalam PBB untuk memastikan bahwa semua manusia dapat menikmati perdamaian dan kemakmuran pada tahun 2030. Komitmen Indonesia dalam mencapai SDGs bukanlah semata memenuhi kesepakatan global namun merupakan upaya mencapai cita-cita Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pencapaian SDGs yang merupakan tujuan bersama masyarakat Indonesia tidak bisa dicapai hanya dengan upaya dari pemerintah saja tetapi memerlukan kontribusi nyata dari berbagai komponen masyarakat. (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2019).

Tabel 1. Komposisi Penduduk Miskin di Indonesia (%)

Tahun	Baseline	Intervensi	Target
2015	11.22	11.22	
2019	9.64	9.49	8.5 - 9.5
2024	7.53	6.88	6.5 - 7.0
2030	5.73	4.33	4 - 4.5

Sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2019

Per Triwulan I 2019, garis kemiskinan di Indonesia sebesar Rp 425.250,-/bulan, dengan besaran tersebut penduduk miskin di Indonesia sekitar 25 juta orang dengan proporsi sekitar 9.40 persen. Karakteristik kemiskinan di Indonesia salah satunya terlihat dari disparitas antar wilayah perdesaan dengan tingkat kemiskinan hampir mencapai dua kali lipat dibandingkan wilayah perkotaan (Badan Pusat Statistik, 2019).

Pencapaian penghapusan kemiskinan diperlukan kolaborasi antar stakeholder, pembagian peran, serta strategi yang inovatif. Salah satu stakeholder yang diharapkan berperan besar dalam pengurangan kemiskinan adalah lembaga keuangan, dimulai skala besar melalui perbankan, koperasi bahkan sampai skala terkecil yaitu lembaga keuangan mikro. Tujuan berdirinya bank adalah meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, begitu pula dengan Koperasi memiliki kesamaan tujuan yaitu meningkatkan potensi dan kemampuan

ekonomi anggota koperasi maupun masyarakat.

Tanpa mengesampingkan peranan lembaga keuangan skala besar dan menengah, didapat bukti bahwa peranan lembaga keuangan mikro merupakan alat efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengembangan sosial ekonomi (Aghion & Morduch, 2010; Duvendack et al., 2011; Fagen, Long, & Stevens, 1975; Khandker & Koolwal, 2016; Samer et al., 2015).

The Microcredit Summit Campaign tahun 2010 melaporkan dari 3.652 lembaga keuangan mikro memiliki jumlah nasabah sebesar 205 juta, 137 juta dari mereka termasuk yang golongan termiskin saat mengambil pinjaman pertama mereka dengan porsi 82,3% merupakan nasabah perempuan (Maes & Reed, 2012)

Pertumbuhan lembaga keuangan mikro yang pesat menguntungkan bagi perekonomian. Logikanya adalah ketika layanan lembaga keuangan mikro memiliki

layanan yang luas dan berkualitas, masyarakat dengan penghasilan rendah memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam perekonomian, memulai usaha baru, bahkan mengembangkan usahanya. Hasilnya, terjadi peningkatan pendapatan, masyarakat mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya secara mandiri dan berkelanjutan.

Perempuan yang berdaya sangat erat kaitannya dengan pengentasan kemiskinan. Dikaitkan dengan asumsi neoklasik mengenai fungsi produksi, jika perempuan memiliki akses yang lebih sedikit ke modal daripada laki-laki, maka pengembalian modal untuk perempuan seharusnya lebih tinggi daripada laki-laki. Dengan demikian, memberi perempuan lebih banyak modal pada prinsipnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan dan berakhir dengan penurunan tingkat kemiskinan rumah tangga (Aghion & Morduch, 2010).

Lembaga keuangan mikro dapat meningkatkan daya tawar perempuan dalam rumah tangga. Perempuan menjadi lebih berdaya dan menikmati kendali yang lebih besar mengenai keputusan dan sumber daya dalam rumah tangga. Bahkan, workshop dan pelatihan literasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro meningkatkan perlindungan dan pengetahuan untuk perempuan dalam mengelola rumah tangga mereka (Aghion & Morduch, 2010).

Research gap pada penelitian ini, berdasarkan penelitian terdahulu diketahui masih terbatasnya penelitian mengenai pengaruh layanan LKM dan pemberdayaan perempuan terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga (Aghion & Morduch, 2010; Duflo, 2012; Duvendack et al., 2011; Karlan, 2009; Nihayah, 2015; Samer et al., 2015). Selain itu ditemukan Layanan LKM tidak hanya berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan keluarga, tetapi juga terhadap pemberdayaan perempuan (Aghion & Morduch, 2010), sehingga pemberdayaan perempuan juga bisa menjadi mediator dari pengaruh layanan LKM terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Perkembangan lembaga keuangan mikro, baik dari segi jumlah lembaga maupun jumlah nasabah cukup pesat, salah satunya terjadi di Desa Rajapolah Kecamatan Rajapolah. Tujuan penelitian ini mengetahui besarnya pengaruh layanan lembaga keuangan mikro dan program pemberdayaan perempuan terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya.

KAJIAN PUSTAKA

Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Awal hadirnya keuangan mikro dapat ditemukan di berbagaidieraerah, tetapi kisah yang paling terkenal dipopulerkan di Bangladesh oleh pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Prof Muhammad Yunus lebih dari 30 tahun yang lalu dengan tujuan mengurangi kemiskinan dengan memberikan pinjaman kecil kepada masyarakat miskin pedesaan di negara tersebut (Yunus, 1999).

Lembaga penyalur kredit mikro telah berkembang selama bertahun-tahun dan tidak hanya memberikan kredit kepada orang miskin, tetapi sekarang juga mencakup berbagai layanan lainnya termasuk tabungan, asuransi (asuransi mikro), pengiriman uang dan layanan non-keuangan seperti pelatihan literasi keuangan dan program pengembangan keterampilan, bahkan di beberapa tempat (misal: BRAC di Bangladesh yang merupakan salah satu pionir), juga membantu nasabah dalam mendistribusikan dan memasarkan hasil produksinya menjadikan lembaga penyalur kredit mikro bertransformasi menjadi lembaga keuangan mikro (Aghion & Morduch, 2010; Robinson, 2001).

Ciri utama lembaga keuangan mikro adalah menargetkan perempuan dengan alasan bahwa, dibandingkan laki-laki, perempuan bekerja lebih baik sebagai nasabah dan partisipasinya menunjukkan hasil perkembangan yang lebih diinginkan (Pitt & Khandker, 1998).

Lembaga keuangan mikro mempengaruhi rumah tangga lebih dari sekedar luaran ekonomi berupa peningkatan pendapatan, tetapi memberikan manfaat

sosial dan pemberdayaan bagi perempuan (Aghion & Morduch, 2010; Banerjee, Duflo, Glennerster, & Kinnan, 2014; Duvendack et al., 2011; Karlan, 2009).

Layanan lembaga keuangan berlandaskan atas dasar kepercayaan, sehingga kualitas layanan merupakan salah satu faktor kunci dari keberhasilan lembaga keuangan (Suhasto, 2018). Layanan LKM dapat diukur dengan dimensi berupa kemudahan akses, kemudahan layanan LKM, kualitas jasa kredit LKM, dan kehandalan pegawai LKM (Layyinaturrobaniyah, 2019).

Pemberdayaan Perempuan

Berawal pada tahun 1980-an, pemberdayaan perempuan bukanlah sesuatu yang dapat diberikan oleh orang lain, hal ini berkaitan dengan transformasi hubungan kekuasaan yang berpihak pada hak-hak perempuan dan peningkatan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, tetapi kini menjadi salah satu perhatian utama pembangunan (Cornwall, 2016).

Program pemberdayaan perempuan merupakan upaya peningkatan kemampuan perempuan dalam memperoleh akses dan kontrol terhadap semua sumber daya dalam seluruh aspek kehidupan (Hanindito, 2001, p. 12). Pemberdayaan perempuan mengacu pada proses dimana mereka yang telah ditolak kemampuannya dalam membuat pilihan hidup yang strategis memperoleh kemampuan tersebut. Kemampuan untuk melaksanakan pilihan ini menggabungkan tiga dimensi yang saling terkait: 1). kemampuan yang mencakup akses dan klaim di masa mendatang atas sumber daya material dan sosial; 2). kemampuan yang meliputi proses pengambilan keputusan, negosiasi, penipuan dan bahkan manipulasi; dan 3). pencapaian kesejahteraan hidup (Kabeer, 1999).

LKM meningkatkan pemberdayaan perempuan melalui 2 mekanisme, yaitu efek secara langsung dan efek secara tidak langsung. Efek langsung dari LKM didapat ketika perempuan menjadi anggota kelompok dan diberikan pelatihan atau lokakarya yang

mengarah pada penciptaan kesadaran/ pengetahuan yang lebih tinggi. Efek tidak langsung didapat ketika menjadi nasabah LKM meningkatkan nilai relative dari waktu dan pendapatan perempuan sehingga meningkatkan daya tawar perempuan dalam rumah tangga yang merupakan cerminan kekuatan perempuan dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga dan dapat menjadi salah satu indeks pemberdayaan perempuan (Swain & Wallentin, 2009).

Layanan LKM meningkatkan pemberdayaan perempuan, membuat perempuan mengambil peran lebih besar dalam pengambilan keputusan rumah tangga, memiliki akses yang lebih besar ke sumber daya keuangan dan ekonomi, memiliki jaringan sosial yang lebih luas, memiliki daya tawar yang lebih besar terhadap suami mereka, dan memiliki kebebasan mobilitas yang lebih besar (Hashemi, Schuler, & Riley, 1996; Pitt & Khandker, 1998).

Pemberdayaan perempuan telah meningkatkan daya tawar dalam keluarga, terutama akses terhadap sumber daya keuangan dan meningkatkan partisipasi dalam menentukan pengeluaran dalam keluarga, salah satunya berdampak pada pengeluaran yang lebih tinggi untuk makanan, pengeluaran yang lebih tinggi untuk anak-anak, serta status gizi anak yang lebih baik yang merupakan salah satu upaya pengentasan kemiskinan (Doepke & Tertilt, 2019; Duflo & Udry, 2004; Khandker, 2005).

Pemberdayaan perempuan dapat diukur dengan menggunakan dimensi akses dan klaim, partisipasi pengambilan keputusan dan negosiasi, serta kesejahteraan hidup (Kabeer, 1999).

Kemiskinan

SDGs bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dan di mana pun keberadaannya. Meski sebelumnya hanya didefinisikan dalam moneter istilah, kemiskinan sekarang dipahami untuk memasukkan realitas hidup dari pengalaman orang dan berbagai deprivasi yang mereka hadapi. Sejak 2010, Multidimensional

Poverty Index (MPI) global telah membandingkan kemiskinan multidimensi akut di lebih dari 100 negara. MPI global memeriksa deprivasi setiap orang di 10 indikator dalam tiga dimensi yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup dengan menawarkan perspektif mendetail untuk mengidentifikasi siapa yang miskin dan bagaimana mereka miskin. (UNDP & OPHI, 2020).

Pemahaman komprehensif mengenai kemiskinan diperlukan guna menentukan strategi penanggulangan yang tepat. Terdapat beberapamasalah berkaitan dengan ketidakberdayaan masyarakat dalam menghadapi kemiskinan, yaitu 1). Pengalaman empiris mengenai kegagalan dalam penanggulangankemiskinan secara efektif dan berkelanjutan, hal ini disebabkan kemiskinan menjadi lebih kompleks bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan dasar. 2). Pemecahan masalah kemiskinan tidak hanya terletak pada masalah ekonomi, namun juga berkembangmenjadi masalah politik, sosial bahkan budaya (Sen, 1987).

Rumah tangga miskin di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek meliputi demografi, pendidikan, ketenagakerjaan, dan perumahan (Badan Pusat Statistik, 2019). Garis kemiskinan di Indonesia per Triwulan I 2019 sebesar Rp.425.250,-/bulan. Misalnya, Rumah tangga dengan 4 orang anggota keluarga apabila memiliki penghasilan kurang

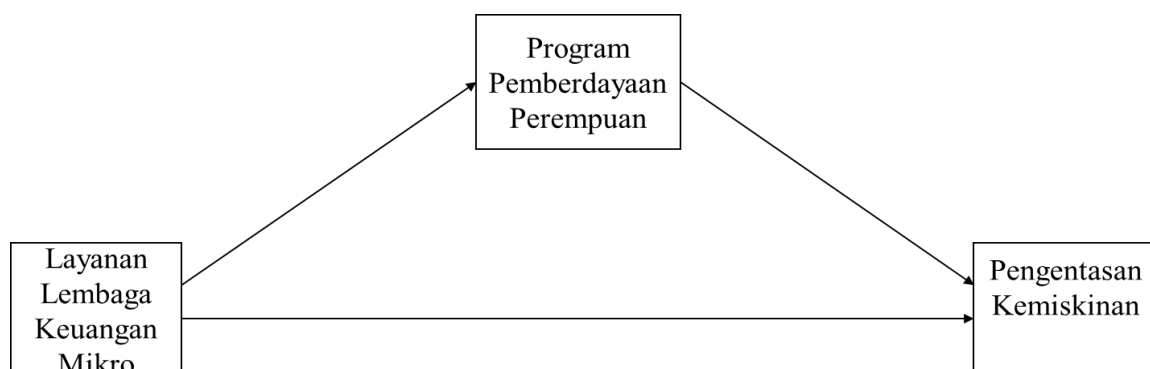
dari Rp 1.701.000,- maka dikategorikan masuk dalam keluarga miskin.

Kerangka Pemikiran

Pengentasan kemiskinan harus dilakukan dalam upaya mencapai salah satu tujuan negara yaitu meningkatkan kesejahteraan umum. Upaya ini merupakan usaha bersama yang memerlukan kontribusi dari semua stakeholder mulai dari pemerintah sampai semua elemen masyarakat. Salah satu pihak yang focus dalam hal pengentasan kemiskinan adalah lembaga keuangan Mikro.

Lembaga keuangan mikro yang bertransformasi tidak hanya berfokus pada pemberian pembiayaan mikro tetapi memberikan berbagai layanan keuangan lainnya diyakini mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan.

Pengentasan kemiskinan juga diyakini memiliki hubungan dengan pemberdayaan perempuan di rumah tangga. Semakin berdaya perempuan, semakin besar kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan dalam rumah tangga. Peningkatan pemberdayaan perempuan merupakan salah satu bentuk layanan dari lembaga keuangan mikro yang merupakan dampak dari pelatihan dan workshop, sehingga bisa disimpulkan peningkatan pemberdayaan perempuan merupakan faktor yang memediasi pengaruh lembaga keuangan mikro dalam mengentaskan kemiskinan. Kerangka pemikiran bisa digambarkan sebagai berikut,



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sumber: Aghion & Morduch, (2010); Banerjee, Duflo, Glennerster, & Kinnan, (2014); Duvendack et al., (2011); Karlan, (2009)

Hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. Layanan lembaga keuangan mikro berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Program pemberdayaan perempuan memediasi pengaruh layanan lembaga keuangan mikro terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menguji teori tertentu dengan carameneliti hubungan antarvariabel yang diukur melalui instrumen, agar data berupa angka dapat dianalisis sesuai prosedural statistik (Creswell, 2014).

Metoda deskriptif dan explanatory survey pada penelitian ini digunakan untuk menggambarkan profil, karakteristik, aspek-aspek yang relevan dan variabel dalam penelitian, yang berkaitan dengan manusia, organisasi/ industri sehingga mendapattemuan aktual dan penting tentang fenomena yang terjadi pada upaya pengentasan kemiskinan di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya, serta memahami/ menganalisis hubungan serta pengaruh antarvariabel independen terhadap variabel dependen dengan tujuan menjawab pertanyaan terkait fakta yang di dapat pada variabel yang diteliti (Babbie, 2016; Sekaran & Bougie, 2016).

Pengujian menggunakan *Simple Mediation Model* memakai alat statistik SPSS versi 23 dan PROCESS versi 3.5 by Andrew F. Hayes model ke-4, yang merupakan salah satu alat uji statistik yang bisa dikatakan baru dan cocok untuk mengukur mediasi. Pengujian ini dilakukan untuk mengukur pengaruh mediasi berupa pengaruh langsung dari layanan LKM terhadap pengentasan kemiskinan dan pengaruh tidak langsung layanan LKM melalui pemberdayaan perempuan, serta mengukur total effect (pengaruh total) layanan LKM terhadap

upaya pengentasan kemiskinan (Hayes, 2018).

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu pengentasan kemiskinan, kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan masyarakat dalam mencapai standar hidup yang minimum (UNDP & OPHI, 2020). Data yang digunakan merupakan data rasio berupa besaran pendapatan rumah tangga setelah mendapat pembiayaan dari LKM.

Variabel independen berupa Layanan LKM yang merupakan kegiatan yang dilakukan untuk nasabah baik pemberian pembiayaan mikro, berbagai jasa keuangan dan pelatihan bagi nasabah (Aghion & Morduch, 2010). Dimensi berupa kemudahan layanan LKM, kemudahan akses, kualitas jasa kredit, dan kehandalan pegawai LKM (Layyinaturrobaniyah, 2019). Data yang digunakan merupakan data ordinal dengan penggunaan skala likert.

Sementara itu variable mediasi yaitu program pemberdayaan perempuan yang merupakan upaya peningkatan kemampuan perempuan dalam memperoleh akses dan kontrol terhadap semua sumber daya dalam seluruh aspek kehidupan (Hanindito, 2001, p. 12). Dimensi variable berupa akses dan klaim, partisipasi pengambilan keputusan dan negosiasi, serta kesejahteraan hidup (Kabeer, 1999). Data yang digunakan merupakan data ordinal dengan skala pengukuran likert.

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer, dengan teknik pengumpulan data survei. Populasi pada penelitian merupakan nasabah perempuan LKM di Desa Rajapolah Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat dengan jumlah 192 orang. Sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat alfa 5%, maka didapat jumlah sample sebanyak 130.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Karakteristik responden berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel berikut ini,

Tabel 2. Karakteristik Responden

Kategori	Uraian	Jumlah	Persen (%)
Jenis Kelamin	Perempuan	130	100
Usia	25 - 35 tahun	19	15
	36 - 45 tahun	51	39
	46 - 55 tahun	46	35
	> 55 tahun	14	11
Pendidikan	SD	91	70
	SLTP	39	30

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2020

Responden terdiri dari perempuan dengan mayoritas berusia antara 36 - 45 tahun sebanyak 39% disusul dengan usia responden antara 46 – 55 tahun sebesar 35% dan sisanya sebesar 26% terdiri dari rentang usia 25 – 35 tahun dan diatas 55 tahun. Tingkat pendidikan responden mayoritas

sebesar 70% menempuh jenjang pendidikan sampai SD dan sisanya sebesar 30% berpendidikan jenjang SLTP.

Ketepatan instrumen dalam penelitian diukur dengan pengujian validitas instrumen variabel layanan LKM dan program pemberdayaan perempuan pada tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Instrumen

Layanan Lembaga Keuangan Mikro		Pemberdayaan Perempuan	
Nomor	R Hitung	Nomor	R Hitung
1	0.412	1	0.832
2	0.322	2	0.832
3	0.495	3	0.504
4	0.293	4	0.702
5	0.572	5	0.702
6	0.384	6	0.832

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2020

Hasil validitas menunjukkan instrumen variabel layanan lembaga keuangan mikro valid, instrumen dalam variabel pemberdayaan perempuan valid, hal ini

terlihat dari r hitung semua instrument menunjukkan nilai yang lebih besar dibandingkan dengan r tabel sebesar 0,172.

Tabel 4. Statistik Reliabilitas

Nama Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items
Layanan Lembaga Keuangan Mikro	0.682	6
Program Pemberdayaan Perempuan	0.902	6

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2020

Reliabilitas ditunjukkan dari nilai Cronbach's Alpha, layanan LKM yang memiliki nilai sebesar 0,682 sedangkan program pemberdayaan perempuan sebesar 0,902 sehingga variabel penelitian reliabel

karena nilai Chronbach's Alpha diatas 0,172. Adapun hasil analisis pengaruh langsung, tidak langsung dan pengaruh total penelitian dapat dilihat pada table 5 dan table 6 berikut

Tabel 5. Model Summary Simple Mediation Pengaruh Layanan LKM dan PPP Terhadap Pengentasan Kemiskinan

Variabel	Variabel							
	PPP				PK			
	Koefisien	SE	t(F)	p	Koefisien	SE	t(F)	p
LLKM	a 0.6478	0.1018	6.3625	0.0000	c' 0.1419	0.0122	8.8383	0.0000
PPP					b 0.1087	15.3576	8.9426	0.0000
Constant	6.5534	2.1807	3.0052	0.0032	2.3511	0.3102	-7.5791	0.0000
R ²	0.2403	14.579	40.482	0.0000	0.7094	0.276	155.037	0.0000

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2020

Hasil uji pengaruh Layanan LKM terhadap PPP pada tabel 5 menunjukkan nilai determinasi sebesar 0.2403 berarti pengaruh layanan lembaga keuangan mikro terhadap program pemberdayaan perempuan sebesar 24.03% dengan nilai signifikansi kurang dari 0.05, hal ini menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan Layanan LKM terhadap PPP dengan nilai koefisien sebesar 0.647.

Nilai determinasi variabel Layanan LKM dan program pemberdayaan perempuan terhadap pengentasan kemiskinan sebesar 0.7094 dengan nilai signifikansi sebesar $0.0000 < 0.5$ menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dengan nilai koefisien terhadap pengentasan kemiskinan Layanan LKM sebesar 0.1419 dan PPP sebesar 0.1087

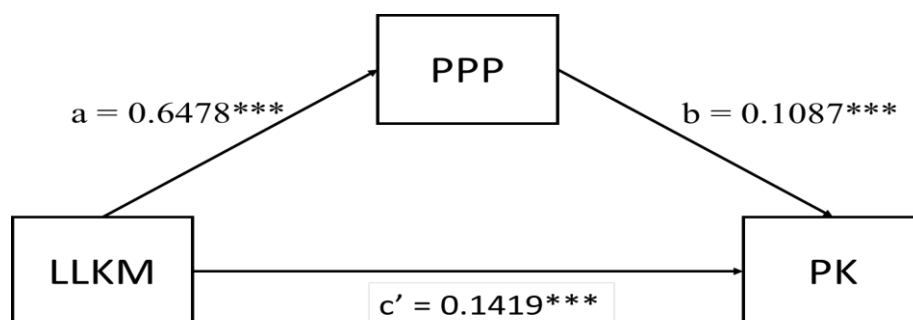
Tabel 6. Pengaruh Total, Langsung dan Tidak Langsung LLKM Terhadap PK

Pengaruh	Koefisien	SE	p
Total	c	0.2123	0.0178
Langsung	c'	0.1419	0.1610
Tidak langsung	ab	0.0704	

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2020

Hasil uji menunjukkan nilai koefisien total effect sebesar 0.21230 dengan nilai signifikansi < 0.05 sehingga bias disimpulkan Layanan LKM berpengaruh signifikan

terhadap pengentasan kemiskinan. Efek langsung, efek tidak langsung dan total efek dari variable penelitian dapat dilihat gambar model dibawah,

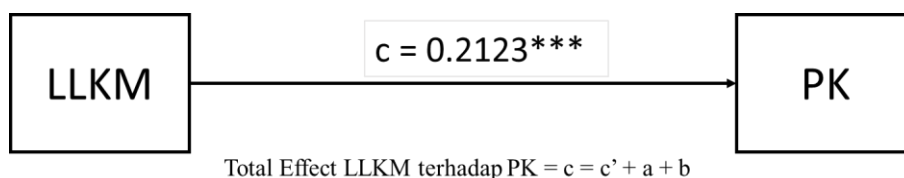


***p < 0,001

Gambar 2. Efek Langsung dan Tidak Langsung Layanan LKM dan Program Pemberdayaan Perempuan Terhadap Pengentasan Kemiskinan

Dari gambar 2 bisa dilihat bahwa terdapat efek langsung layanan LKM terhadap pengentasan kemiskinan memiliki nilai pengaruh yang positif, begitu juga pengaruh tidak langsung melalui pemberdayaan perempuan memiliki nilai

hubungan positif. Karena koefisien regresi c' dan $a-b$ signifikan maka dapat disimpulkan pemberdayaan perempuan memediasi pengaruh layanan keuangan terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya.



*** $p < 0,001$

Gambar 3. Efek Total Layanan LKM dan Program Pemberdayaan Perempuan Terhadap Pengentasan Kemiskinan

Pengaruh total dari Layanan LKM dan Program Pemberdayaan Perempuan terhadap Pengentasan Kemiskinan memiliki nilai signifikan kurang dari 0.001 dengan nilai koefisien sebesar 0.2123 sehingga dapat disimpulkan Layanan LKM berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya.

Pembahasan

Pengaruh Layanan LKM terhadap Pengentasan Kemiskinan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa layanan LKM berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan, hal ini bermakna dengan semakin meningkatnya kualitas layanan LKM maka semakin berperan dalam pengentasan kemiskinan. LKM tidak hanya berperan dalam menyalurkan pembiayaan mikro, berperan juga dalam pendampingan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan dari nasabahnya melalui pelatihan maupun lokakarya menjadikan nasabah bisa mengelola pembiayaan yang didapat lebih produktif sehingga pendapatan rumah tangga bisa ditingkatkan lebih tinggi.

Penelitian mengenai pengaruh LLKM terhadap pengentasan kemiskinan sudah banyak dilakukan di berbagai wilayah. Di negara Bangladesh yang terkenal sebagai pionir LKM terdapat banyak penelitian yang mengkonfirmasi bagaimana pengaruh LKM terhadap pengentasan kemiskinan (Aghion & Morduch, 2010; Khandker, 2005).

Di Malaysia LKMAmanah Ikhtiar Malaysia (AIM) memainkan peran penting dalam pembangunan sosial ekonomi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah terutama perempuan (Al-Mamun, Mazumder, & Malarvizhi, 2014; Al-shami et al., 2016). Di Indonesia penelitian mengenai dampak LKM PNM Mandiri terhadap pengentasan kemiskinan salah satunya di kecamatan Bangil, Tuban dengan temuan bahwa Layanan LKM mengurangi kemiskinan sebesar 20% (Nihayah, 2015).

Program Pemberdayaan Perempuan Memediasi Pengaruh Layanan Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Pengentasan Kemiskinan

Program pemberdayaan perempuan berdasarkan hasil penelitian diketahui memediasi pengaruh Layanan LKM terhadap pengentasan kemiskinan. Menguatkan pendapat bahwa Layanan LKM meningkatkan pemberdayaan perempuan, sedangkan perempuan yang berdaya sangat berkaitan erat dengan pengentasan kemiskinan (Aghion & Morduch, 2010)

Layanan LKM berpengaruh terhadap pemberdayaan perempuan, semakin meningkat layanan LKM akan meningkatkan pemberdayaan perempuan. Layanan LKM berpengaruh terhadap pemberdayaan merupakan dampak dari upaya pendampingan dan pelatihan atau lokakarya sehingga terjadi peningkatan pengetahuan, keterampilan, peningkatan daya

tawar perempuan dalam rumah tangga yang merupakan cerminan kekuatan perempuan dalam berperan proses penentuan keputusan dalam rumah tangga yang merupakan salah satu indeks pemberdayaan perempuan.

Penelitian ini menguatkan beberapa penelitian terdahulu mengenai dampak dari LKM terhadap peningkatan pemberdayaan perempuan di berbagai wilayah.

Penelitian mengenai pengaruh LKM terhadap pemberdayaan perempuan banyak dilakukan di Bangladesh dimana merupakan salah satu daerah pioneer dalam keuangan mikro melalui lembaga non pemerintah seperti Bangladesh Rural Advancement Committee, Association for Social Advancement and PROSHIKA menunjukkan hasil bahwa layanan keuangan mikro sangat erat berhubungan dengan pemberdayaan perempuan (Chowdhury & Chowdhury, 2011). Penelitian di Indonesia dilakukan terhadap Orang Terkena Dampak (OTD) Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang, ditemukan juga bukti bahwa layanan LKM berpengaruh positif terhadap pemberdayaan perempuan (Layyinaturrobaniyah, 2019).

Temuan di Malaysia menunjukkan bahwa kredit mikro Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) memberdayakan perempuan dan meningkatkan kesetaraan gender. Pemberdayaan perempuan memungkinkan perempuan untuk mengakses modal keuangan, membentuk usaha mikro dan kecil mereka dan memperoleh pendapatan yang membantu mereka berkontribusi pada pengeluaran rumah tangga, memberi mereka kekuatan daya tawar dalam pengambilan keputusan dan pengendalian sumber daya dan meningkatkan harga diri perempuan dalam rumah tangga dan komunitas mereka (Al-shami et al., 2016).

Selanjutnya, peningkatan indeks pemberdayaan perempuan yang terbentuk dari layanan LKM menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan, hal ini berarti dengan semakin meningkatnya pemberdayaan perempuan maka meningkatkan pengentasan kemiskinan.

Hal ini mengindikasikan bahwa semakin berdaya perempuan dengan pengetahuan dan tawar yang lebih tinggi meningkatkan peranan perempuan dalam membantu peningkatan pendapatan rumah tangga sehingga membantu dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Perempuan yang berdaya mengambil peran lebih besar dalam proses keputusan rumah tangga, akses lebih besar terhadap ekonomi, keuangan dan sumber daya, memiliki jaringan sosial yang lebih meningkat, daya tawar yang meningkat terhadap suami mereka, dan memiliki kebebasan mobilitas yang lebih tinggi dikaitkan dengan asumsi ekonomi klasik menghasilkan peningkatan ekonomi yang relative tinggi dalam rangka pengentasan kemiskinan (Aghion & Morduch, 2010; Pitt & Khandker, 1998).

Apabila dikaitkan dengan MPI dengan tiga dimensi yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup, pemberdayaan perempuan berdampak pada pengeluaran yang lebih tinggi untuk makanan, pengeluaran yang lebih tinggi untuk anak-anak, serta status gizi anak yang lebih baik yang merupakan salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan (Duflo & Udry, 2004; Khandker, 2005)

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Layanan LKM memiliki pengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya, 2) Pemberdayaan perempuan memediasi pengaruh layanan LKM terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya.

Saran

Implikasi dari penelitian inidiantaranya adalah: 1) Pemberdayaan perempuan terbukti merupakan salah satu factor yang berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan, sehingga perlu perhatian khusus dari berbagai

stakeholder dalam upaya peningkatan pemberdayaan perempuan berupa pendampingan usaha dan berbagai pelatihan dan workshop dengan tujuan menjadikan perempuan lebih berdaya dalam mengelola rumah tangganya, 2) Layanan LKM terbukti merupakan faktor yang berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan, bahkan ditemukan bahwa pengaruh terhadap pengentasan kemiskinan dimediasi oleh pemberdayaan perempuan, sehingga bisa disimpulkan apabila LKM ditingkatkan dari segi kualitas dan kualitas, terutama persoalan mengenai perijinan LKM maupun keterbatasan dana dalam menunjang operasional yang membutuhkan perhatian berbagai pihak baik pemerintah dan berbagai elemen masyarakat maka tujuan pembangunan yang meliputi pemberdayaan perempuan dan pengentasan kemiskinan akan tercapai. 3) Penelitian lebih lanjut untuk melihat pengaruh LKM dan pemberdayaan perempuan terhadap pengentasan kemiskinan disarankan menggunakan jumlah objek yang lebih besar dengan wilayah penelitian yang lebih beragam, selain itu angka pengukuran kemiskinan supaya lebih menyeluruh dapat menggunakan Multidimensional Poverty Index (MPI)

DAFTAR PUSTAKA

- Aghion, B. A. de, & Morduch, J. (2010). *The Economics of Microfinance* (2nd ed.). Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
- Al-Mamun, A., Mazumder, M. N. H., & Malarvizhi, C. A. (2014). Measuring the effect of Amanah Ikhtiar Malaysia's microcredit programme on economic vulnerability among hardcore poor households. *Progress in Development Studies*, 14(1), 49–59.
- Al-shami, S. S. A., Razali, M. M., Majid, I., Rashid, N., Samer, S., Razali, M. M., & Majid, I. (2016). The effect of microfinance on women's empowerment: Evidence from Malaysia. *Asian Journal of Women's Studies*, 22(3), 318–337. <https://doi.org/10.1080/12259276.2016.1205378>
- Babbie, E. (2016). *The Practice of Social Research*. Boston, MA: Cengage Learning.
- Badan Pusat Statistik. (2019). Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2019. *Penghitungan Dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2019*, (1), xvi+72.
- Banerjee, A., Duflo, E., Glennerster, R., & Kinnan, C. (2014). The miracle of microfinance? Evidence from a randomized evaluation. *American Economic Journal: Applied Economics*, 7(1), 22–53. <https://doi.org/10.1257/APP.20130533>
- Chowdhury, S. S., & Chowdhury, S. A. (2011). Microfinance and Women Empowerment: A Panel Data Analysis Using Evidence from Rural Bangladesh. *International Journal of Economics and Finance*, 3(5), 86–96. <https://doi.org/10.5539/ijef.v3n5p86>
- Cornwall, A. (2016). Women's Empowerment: What Works? *Journal of International Development*, 28, 342–359. <https://doi.org/10.1002/jid.3210>
- Creswell, J. W. (2014). *A Concise Introduction To Mixed Methods Research*. Sage Publications.
- Doepke, M., & Tertilt, M. (2019). Does female empowerment promote economic development? *Journal of Economic Growth*, 24(4), 309–343. <https://doi.org/10.1007/s10887-019-09172-4>
- Duflo, E. (2012). Women empowerment and economic development. *Journal of Economic Literature*, 50(4), 1051–1079. <https://doi.org/10.1257/jel.50.4.1051>
- Duflo, E., & Udry, C. (2004). Intrahousehold Resource Allocation in Cote d'Ivoire: Social Norms, Separate Accounts and Consumption Choices. *NBER Working Paper*, 55.
- Duvendack, M., Palmer-Jones, R., Copestake, J. G., Hooper, L., Loke, Y., & Rao, N. (2011). What is the evidence of the impact of microfinance on the well-being of poor people? *Systematic*

- review. London: EPPI-Centre: Social Science Research Unit, Institute of Education, University of London.
- Fagen, S. A., Long, N. J., & Stevens, D. J. (1975). *Teaching children self-control: Preventing emotional and learning problems in the elementary school*. Columbus, OH: Charles E. Merrill.
- Hanindito, A. (2001). *Berdaya Bersama Perempuan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Hashemi, S. M., Schuler, S. R., & Riley, A. P. (1996). Rural Credit Programs and Women's Empowerment in Bangladesh. *World Development*, 24(4), 635–653.
- Hayes, A. F. (2018). *Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis*. London and New York: The Guilford Press.
- Kabeer, N. (1999). Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment. *Development and Change*, 30(May), 435–464.
- Karlan, D. (2009). Expanding Credit Access: Using Randomized. *Review of Financial Studies*, 23(1), 433–464.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2019). *Peta Jalan SDGs Indonesia*. Retrieved from <http://sdgs.bappenas.go.id/dokumen/>
- Khandker, S. R. (2005). Microfinance and Poverty: Evidence Using Panel Data from Bangladesh. *World Bank Economic Review*, 19(2), 263–286.
- Khandker, S. R., & Koolwal, G. B. (2016). How has microcredit supported agriculture? Evidence using panel data from Bangladesh. *Agricultural Economics (United Kingdom)*, 47(2), 157–168.
- Layyinaturrobaniyah, L. (2019). Lembaga Keuangan Mikro Dan Pemberdayaan Perempuan Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Sumedang. *Sosiohumaniora*, 21(2), 140–143.
- Maes, J. P., & Reed, L. R. (2012). *State of the Microcredit Summit Campaign Report 2012*. Washington, DC: the Microcredit Summit Campaign (MCS).
- Nihayah, A. . (2015). Pengaruh Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Poverty Reduction Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Bangilan, Tuban). *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2), 1–24.
- Pitt, M. M., & Khandker, S. R. (1998). The impact of group-based credit programs on poor households in Bangladesh: Does the gender of participants matter? *Journal of Political Economy*, 106(5), 958–996.
- Robinson, M. (2001). *The Microfinance Revolution: Sustainable Banking for the Poor*. Washington, DC: The World Bank.
- Samer, S., Majid, I., Rizal, S., Muhamad, M. R., Sarah-Halim, & Rashid, N. (2015). The Impact of Microfinance on Poverty Reduction: Empirical Evidence from Malaysian Perspective. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 195, 721–728.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business (7th ed.)*. Chichester, West Sussex, United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.
- Sen, A. (1987). *The Standard of Living*. Clare Hall, Cambridge University.
- Suhasto, R. I. N. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kedekatan Emosional Terhadap Loyalitas Nasabah. *Jurnal Inspirasi Bisnis Dan Manajemen*, 2(1), 55.
- Swain, R. B., & Wallentin, F. Y. (2009). Does microfinance empower women? Evidence from self-help groups in India. *International Review of Applied Economics*, 23(5), 541–556.
- UNDP, & OPHI. (2020). *Charting pathways out of multidimensional poverty: Achieving the SDGs*.
- Yunus, M. (1999, November). Grameen Bank. *Scientific American*.